

Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland*

Kabupaten Kulon Progo

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Siti Fatimah

Nomor Mahasiswa : 17313052

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2019

Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland*

Kabupaten Kulon Progo

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Siti Fatimah

Nomor Mahasiswa : 17313052

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASRISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2019

Penulis,


METERAI
TEMPEL
E9C05AFF685293206
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Siti Fatimah

PENGESAHAN

Analisis Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* Kabupaten

Kulon Progo

Nama : Siti Fatimah
Nomor Mahasiswa : 17313052
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogtakarta, 10 Mei 2019
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH
HINTERLAND KABUPATEN KULON PROGO**

Disusun Oleh : **SITI FATIMAH**
Nomor Mahasiswa : **17313052**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019

Penguji/Pembimbing : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc


.....

Penguji : Unggul Priyadi, Dr., M.Si.


.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph. D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat, kerendahan hati dan syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu terkasih dan tersayang yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta memberikan semangat untuk tetap rajin melaksanakan perkuliahan dan penyusunan skripsi. Kepada kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan semangat dan menghibur. Terima kasih sudah memberikan motivasi dan memberikan nasehat-nasehat.
2. Almamater D3 Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang cintai dan banggakan.
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamiin, segala puji atas segala berkat, rahmat, serta hidayah-Nya kepada Allah *subhanahu wa,taala* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir dengan baik. Sholawat serta salam penulis junjungkan kepada kekasih Allah, nabi besar Muhammad *salallahu allahi wa sallam*. Semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu bersama keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak mungkin menyelesaikan sendiri, melainkan banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua yang saya cintai, Bapak Nasirun dan Ibu Darmi. Terima kasih atas doa, perhatian, dorongan materi, kepercayaan serta kasih sayang yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
2. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc selaku dosen pembimbing skripsi dimana ditengah-tengah kesibukan beliau, dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Listya Endang Artiani S.E., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing dalam proses akademik di kampus tercinta.
4. Bapak Jaka Sriyana, SE, M.Si, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D selaku Kaprodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran selama proses perkuliahan. Serta segenap staff prodi Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi
7. Kakak tercinta Darma Agus Setiawan dan Zak Yasin serta adik perempuan Putri Aulia terima kasih karena selalu memberi semangat untuk belajar
8. Para sahabat terkasih Ayu Fitria, Eni Junaeni, Mery Tasha, Eka Noviyya, Adi Saputra serta teman-teman seperjuangan Laili Hidayati, Iga Komala, Nurhanna Rizka, Widya Dwi Utami dan Desta Miranda terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan.

Dan penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 Mei 2019

Siti Fatimah

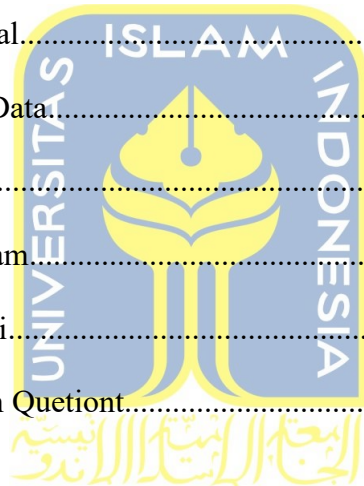
Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Berita Acara Ujian Akhir/Skripsi.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Daftar Isi.....	viii
Halaman Daftar Tabel.....	xi
Halaman Daftar Gambar.....	xiii
Halaman Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Teori Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	16

2.2.2 Teori Tempat Sentral.....	17
2.2.3 Teori Gravitasi.....	19
2.2.4 Teori Basis Ekonomi.....	19
2.2.5 Otonomi Daerah.....	20
2.2.6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Kulon Progo.....	22
2.3 Hipotesis.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.3 Metode Analisis.....	32
3.3.1 Analisis Skalogram.....	32
3.3.2 Analisis Gravitasi.....	34
3.3.3 Analisis Location Quetiont.....	34



BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	36
4.2 Hasil dan Analisis.....	38
4.2.1 Analisis Skalogram.....	38
4.2.2 Analisis Gravitasi.....	45
4.2.3 Analisis Location Quetiont.....	49
4.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kab. Kulon Progo.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Implikasi.....	56
Daftar Pustaka.....	57



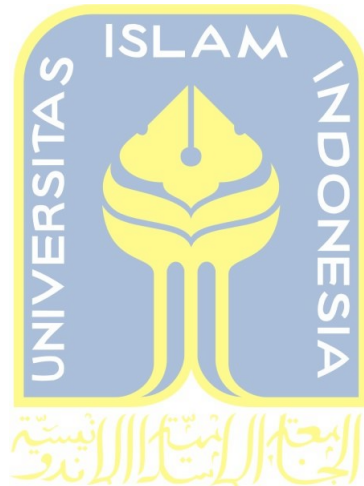
Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Kab. Kulon Progo 2010 - 2017.....	2
1.2 PDRB Kab. Kulon Progo menurut Lapangan Usaha 2013-2017.....	6
4.1 Jumlah Sarana Pemerintahan per Kecamatan di Kabupaten Kulon progo tahun 2017.....	38
4.2 Orde dan Range Wilayah.....	40
4.3 Hierarki Pusat Pertumbuhan Kecamatan berdasarkan Analisis Skalogram di Kab. Kulon Progo.....	42
4.4 Tabel Kesimpulan Hasil Nilai Interaksi Wilayah Pusat Pertumbuhan & Hinterland Kab. Kulon Progo.....	45
4.5 Hasil Analisis Location Quetiont Sektor Perekonomian Kab. Kulon Progo Prov. DIY Tahun 2010-2017.....	50



Daftar Gambar

Gambar	Halaman
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo.....	37
4.2 Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo Hasil Analisis Skalogram dan Gravitasi.....	48



Abstrak

Perencanaan pembangunan daerah harus berjalan seimbang dan terencana agar dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan suatu daerah. Salah satu cara yang digunakan adalah mempercepat pembangunan daerah adalah dengan menetapkan pusat pertumbuhan pada daerah tersebut dan mengetahui sektor basis yang menjadi andalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dan kecamatan *hinterland* di Kabupaten Kulon Progo dan menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan dengan daerah pendukung. Hal tersebut dapat dianalisis menggunakan analisis skalogram, analisis gravitasi dan analisis *location quotient*. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat wilayah kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo serta menganalisis fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Jenis data yang diteliti adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber lain. Hasil dari penelitian menunjukkan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan ada lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, Kecamatan Galur, Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih. Sektor basis perekonomian Kabupaten Kulon Progo adalah Sektor Pertambangan & Penggalan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Kata Kunci : Pusat Pertumbuhan, *Hinterland*, Skalogram, Gravitasi, LQ

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah adalah program pemerintah daerah dalam mengupayakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemajuan daerah melalui sektor perekonomian daerah. Program ini memiliki adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah difokuskan pada program yang akan dijalankan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah selanjutnya diharapkan dapat menjalankan program secara mandiri dalam menentukan kebijakan dan pendanaan secara terstruktur. Kondisi ini diharapkan mampu menciptakan peningkatan dalam menentukan dan manajemen sumber potensi suatu daerah sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diminimalisir (Erawati & Yasa, 2011)

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan perekonomian yang akan meningkatkan hasil produksi barang dan jasa dari pelaku ekonomi yang akan berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukirno,2000:55). Artinya, pertumbuhan ekonomi menghitung pertambahan dari suatu potensi perekonomian. Menurut (Maqin, 2011) salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

dapat dilihat dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB adalah nilai dari total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo diukur oleh data PDRB yang menjelaskan suatu daerah untuk menaikkan atau menciptakan nilai tambah pada waktu tertentu. Data tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1.1: Perkembangan PDRB Per Kapita Kab. Kulon Progo 2010-2017

No	Tahun	PDRB per Kapita	
		atas dasar harga berlaku	atas dasar harga konstan 2000
1	2010	9.121.466	4.580.532
2	2011	9.910.472	4.790.630
3	2012	10.671.984	4.992.174
4	2013	11.770.580	5.229.120
5	2014	12.571.554	5.448.557
6	2015	13.872.010	5.628.822
7	2016	15.232.854	5.935.592
8	2017	16.733.290	6.267.986

Sumber: (BPS, 2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2010-2017 pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten Kulon Progo menurut dasar harga berlaku dan dasar konstan 2000 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besar peningkatan nilai pertumbuhan PDRB per kapita yang terjadi bernilai berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh

perbedaan jumlah penduduk. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku paling tinggi pada tahun 2017 yaitu bernilai Rp.16.733.290 dengan pertumbuhan paling rendah di tahun 2010 yaitu sebesar Rp.9.121.466. Namun, memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu program yang dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam meningkatkan pembangunan daerah secara tepat sasaran adalah dengan menentukan wilayah pertumbuhan dan daerah pendukungnya. Penentuan wilayah pusat pertumbuhan adalah salah satu cara untuk menggerakkan pembangunan kearah yang lebih positif. Setelah penentuan pusat pertumbuhan ekonomi maka pembangunan akan ditujukan ke daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dengan fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut, secara tidak langsung kemajuan suatu daerah akan mengakibatkan peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin baik akan mendorong pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, komunikasi, akomodasi dan kelembagaan lainnya yang dapat menumbuhkan peningkatan daya tarik para investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut (Imelda, Nurjayanti, & Ochtadila, 2013).

Penetapan wilayah pusat pertumbuhan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan. Faktor penentu wilayah pusat pertumbuhan dengan melakukan peningkatan fasilitas sebagai pendorong kegiatan ekonomi maupun pelayanan terhadap masyarakat. Fasilitas yang

dimiliki oleh tiap kecamatan berbeda-beda. Perbedaan fasilitas tersebut akan menjadi hierarki wilayah pusat pertumbuhan. Kecamatan yang memiliki fasilitas yang paling lengkap akan menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Dan kecamatan yang fasilitasnya kurang akan menjadi hinterland atau wilayah pendukung bagi wilayah pusat (Priyadi & Atmadji, 2017)

Infrastruktur dan fasilitas sangatlah berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat maupun pembangunan wilayah, dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah. Semakin lengkap fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah maka masyarakat dapat lebih mudah dalam mengaksesnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada. Dalam melakukan pembangunan wilayah, fasilitas yang perlu disediakan akan sangat mempengaruhi kehidupan di wilayah tersebut. Fasilitas yang dapat di akses masyarakat di wilayah *hinterland* tidak boleh diabaikan agar tidak terjadi kesenjangan wilayah dengan daerah pusat.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan dapat memberikan manfaat atau *spill over effect* positif terhadap *hinterland*, sehingga gap yang ada tidak terlalu besar. Dengan menentukan wilayah pusat pertumbuhan dengan memfokuskan pertumbuhan terutama perekonomian pada daerah tersebut, akan menguntungkan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Perkembangan wilayah pusat pertumbuhan

akan meningkatkan produksi daerah *hinterland* sehingga daerah *hinterland* juga akan mengalami perkembangan (Utari, 2015).

Kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan antar daerah adalah salah satu permasalahan yang nyata maka dari itu perubahan pendekatan sektoral ke pendekatan regional, dengan menentukan wilayah sebagai mobilisasi perekonomian wilayah (*prime mover*) yang memiliki ciri khas sebagai kecamatan pertumbuhan dibandingkan kecamatan lainnya dalam suatu kabupaten. Pertumbuhan kawasan andalan seharusnya dapat memberikan kontribusi ke arah lebih positif bagi pertumbuhan daerah pendukungnya melalui pemberdayaan sektor/sub sektor unggulan sebagai mobilisasi perekonomian daerah (Ramlah, 2016).

Pertumbuhan kawasan andalan diartikan dapat menciptakan hasil positif untuk pertumbuhan ekonomi daerah sekitar melalui manajemen sektor-sektor unggulan sebagai mobilisasi perekonomian daerah dan hubungan ekonomi antar daerah. Memfokuskan pertumbuhan ekonomi sebagai kebijakan penentu kawasan andalan adalah variabel utama yang menjadi indikator dalam perekonomian pembangunan (Kuncoro, 2010).

Penetapan wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo sebagai jawaban untuk penggerak perekonomian wilayah dengan ciri kawasan cepat tumbuh melalui sektor-sektor yang terdapat pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yang tercantum melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
PDRB Kab. Kulon Progo menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.131.360,53	1.120.167,94	1.138.920,24	1.158.714,13	1.178.485,98
Pertambangan dan Penggalian	90.140,20	91.487,50	91.992,76	93.577,01	106.376,67
Industri Pengolahan	696.306,88	755.840,41	782.466,66	823.768,21	888.952,36
Pengadaan Listrik dan Gas	5.714,22	6.026,66	6.205,32	7.099,17	7.365,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.241,53	8.341,53	8.523,55	8.739,99	9.133,91
Konstruksi	483.855,75	508.855,75	530.760	565.132,81	633.469,39
Perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	757.217,69	796.717,69	848.655,92	901.270,62	977.513,94
Transportasi dan Pergudangan	502.391,57	512.691,34	531.194,16	545.330,79	564.545,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	209.359,38	219.373,88	231.152,40	244.855,30	257.194,67
informasi dan Komunikasi	352.124,32	378.089,96	398.651,24	430.223,02	455.455,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	157.991,97	175.745,08	189.970,43	198.342,09	200.443,41
Real Estate	202.865,31	213.562,36	226.908,25	239.462,01	254.389,26
Jasa Perusahaan	18.328,69	19.560,46	20.889,15	21.612,53	22.706,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	461.077,71	488.812	513.344,61	544.978	571.987,94
Jasa Pendidikan	353.043,89	378.043,89	405.420,46	421.214	450.757,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84.986,05	91.000	97.499,81	103.017,32	109.752,98
Jasa Lainnya	226.654,60	240.000	259.240,49	273.438,99	285.093,80
Total PDRB	5.741.660,29	6.004.316,44	6.281.795,76	6.580.776,13	6.973.625,52

Sumber: (BPS, 2017)

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari kota Yogyakarta. Kulon Progo memang bukan kabupaten yang memiliki sektor pariwisata yang menjadi unggulan namun dapat dilihat dari PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2013-2017 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan menunjukkan subsektor yang menjadi unggulan dari Kabupaten Kulonprogo.

Pertumbuhan kawasan andalan memberikan kontribusi positif melalui sektor unggulan di setiap daerah yang saling berkaitan. Tiap daerah memiliki hubungan agar terjadinya keadaan perekonomian serta sosial yang baik. Nilai interaksi wilayah merupakan hubungan yang terjadi antar penduduk di suatu wilayah tertentu dengan wilayah lainnya, baik yang berada dekat disekitar wilayah itu maupun berada jauh dengan wilayah itu (Yarman, 2015). Interaksi memiliki hubungan timbal balik antar kecamatan atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan dan permasalahan baru. Untuk menggambarkan besar kecilnya interaksi yang terjadi antar wilayah dapat disampaikan melalui angka sebagai nilai interaksi.

Nilai interaksi suatu wilayah akan menunjukkan interaksi yang memiliki nilai tertinggi dan nilai terendah. Perbedaan antara nilai interaksi yang terjadi menunjukkan bahwa diperlukannya peran optimal dari pemerintah daerah. Dalam peningkatan pertumbuhan wilayah, hal tersebut penting untuk dapat menyusun rencana ataupun proyek yang cocok untuk dikembangkan pada masing-masing kecamatan yang menjadi pusat

pertumbuhan dan daerah pendukungnya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul :

“ Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* di Kabupaten Kulon Progo”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah hinterland di Kabupaten Kulon Progo.
2. Bagaimana nilai interaksi dapat mempengaruhi perekonomian antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukung di Kabupaten Kulon Progo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dan kecamatan hinterland di Kabupaten Kulon Progo
2. Untuk menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan dengan daerah pendukung (Hinterland)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini untuk mengetahui daerah yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan dan wilayah hinterlandnya dan bagaimana peran optimum daerah hinterland terhadap daerah pusat pertumbuhan di Kab. Kulon progo.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian terdiri dari :

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang dari judul yang diambil untuk diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bagian ini mengemukakan hasil penelitian yang sebelumnya, jurnal nasional yang publikasikan serta jurnal internasional yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian yang diambil penulis serta mengemukakan teori-teori yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian.

3. BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang diperlukan dan metode analisis yang digunakan penulis untuk penelitian.

4. BAB IV : Hasil dan Analisis

Pada bagian ini mengolah data yang didapatkan dalam penelitian dan menjelaskan hasil data temuan-temuan dari penelitian serta menganalisis implementasi yang akan dilakukan pada sub bab hasil dan analisis.

5. BAB V : Simpulan dan Implikasi

Pada bagian ini memaparkan kesimpulan dari hasil data analisis yang dilakukan peneliti serta memberikan saran untuk implikasi kepada pihak yang tujukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini mengkaji atas penelitian-penelitian sebelumnya yang dimana penelitian tersebut hampir sama sehingga peneliti jadikan sebuah rujukkan untuk menulis. Peneliti mengkaji beberapa penelitian sebelumnya agar menghindari dari adanya plagiarisme. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

(Priyadi & Atmadji, 2017) meneliti tentang pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland di Provinsi DIY. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui wilayah kecamatan yang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar wilayah kecamatan yang sebagai kecamatan hinterland di Provinsi D.I Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan variabel nilai PDRB per kapita, nilai interaksi antar wilayah, jumlah fasilitas yang tersedia dan jumlah penduduk per kapita. Data tersebut diolah menggunakan analisis konsentrasi daerah, analisis *skalogram* dan analisis gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan Kota Yogyakarta pada tahun 2013 adalah Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul serta sebagai wilayah hinterland adalah Kabupaten Kulonprogo dengan nilai interaksi 591.883.954. Sedangkan untuk Kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah Kota Yogyakarta,

Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul serta Kabupaten Sleman sebagai hinterland dengan nilai interaksi 407.568.522.

(Kareza & Muta'ali, 2010) meneliti tentang variasi tingkat perekonomian antar kecamatan di Kabupaten Kulonprogo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *location quotient* (LQ), *shift share*, dan analisis (kuadran tipologi). Untuk mengetahui laju perekonomian wilayah menggunakan variabel laju pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya dan data PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo sedangkan untuk menentukan variasi potensi sektor unggulan menggunakan variabel PDRB Kecamatan Kabupaten Kulon Progo menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa perekonomian yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari sektoral adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian serta sektor industri pengolahan di wilayah pesisir.

(Imelda, 2013) meneliti tentang pusat pertumbuhan dan daerah hinterland Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki, jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dan PDRB per kapita. Data tersebut diolah menggunakan metode *skalogram* yaitu untuk mengetahui peranan suatu daerah berdasarkan kemampuan suatu daerah memberikan pengaruh kepada masyarakat. Hasil dari penelitian diketahui bahwa wilayah pusat pertumbuhan dalam sektor primer di Kota Palembang adalah Kecamatan di tingkat I dan tingkat II, sektor sekunder adalah Kecamatan Ilir Barat

tingkat I dan tingkat II (Palembang bagian Barat), Suka ramai (Palembang bagian Utara), Kalidoni dan Sako (Palembang bagian Timur), Ulu II (Palembang bagian Selatan) sedangkan kecamatan lainnya seperti Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kertapati dan Kecamatan Plaju adalah sebagai wilayah kecamatan hinterland di Kota Palembang.

(Yarman, 2015) meneliti tentang wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* dalam pengembangan di wilayah Kabupaten Nias. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui kecamatan-kecamatan yang berpotensi sebagai wilayah pusat perekonomian di Kabupaten Nias dan mengetahui nilai keterkaitan antara wilayah pusat pertumbuhan dan daerah *hinterland*. Penelitian tersebut menggunakan data jumlah penduduk, jumlah fasilitas umum, dan nilai interaksi antar wilayah. Data tersebut diolah dengan data kualitatif deskriptif dengan metode skalogram untuk menentukan kelas-kelas pusat pertumbuhan dengan hasil yang didapatkan bahwa Kecamatan Gido, Kecamatan Idano gawo dan Kecamatan Botomuzoi sebagai wilayah pusat pertumbuhan dengan tingkat kelas I sampai dengan kelas III.

(Wahyuningtiyas, 2011) meneliti tentang penentu kawasan andalan sebagai wilayah pusat pertumbuhan pada suatu Kabupaten Kalimantan Timur. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menganalisis kawasan yang menjadi andalan dengan pola pertumbuhan ekonomi dan sektor yang berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kalimantan Timur. Metode yang digunakan untuk penelitian tersebut

adalah tipologi klassen dan *location quotient* (LQ). Analisis tipologi klassen digunakan sebagai penentu pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel jumlah pendapatan perkapita dan PDRB suatu kabupaten/kota yang diteliti, sedangkan analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor yang menjadi andalan dengan membandingkan PDRB di suatu kabupaten dengan sektor yang sama pada PDRB provinsi dari kabupatennya. Hasil penelitian diperoleh di Kabupaten Malinau sektor unggulannya adalah sektor pertanian, Kabupaten Kutai Timur sektor unggulannya adalah sektor pertambangan dan penggalian, Kota Bontang sektor unggulannya adalah sektor industri, Kota Tarakan sektor unggulannya adalah gas dan air bersih, Kota Balikpapan sektor unggulannya adalah sektor konstruksi dan Kota Samarinda sektor unggulannya adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

(Ramlah, 2016) meneliti tentang pengaruh Kota Palu sebagai pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah hinterland. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah hinterland Kota palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *skalogram* dengan menggunakan variabel data fasilitas layanan, nilai sentralisasi gabungan, jumlah total atribut fasilitas. Dan menggunakan metode analisis gravitasi dengan variabel nilai gravitasi antara wilayah, PDRB wilayah, Jumlah penduduk wilayah, Jarak antara wilayah 1 dan 2. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall bahwa Kota Palu merupakan

pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis gravitasi Kabupaten yang memiliki keterkaitan yang erat dengan daerah pendukungnya adalah Kabupaten Donggala.

(Rahayu & Santoso, 2014) meneliti tentang wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian tersebut bertujuan untuk penetapan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel PDRB perkapita dan jenis sarana dan prasarana yang tersedia. Data tersebut diolah menggunakan analisis *skalogram* dan tipologi klassen. Hasil penelitian yang diperoleh terdapat kecamatan yang layak dan tidak layak berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi dan jumlah sarana dan prasarana di masing-masing kecamatan. Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Playen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu dan Kecamatan Karangmojo sedangkan kecamatan sebagai hinterland adalah Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Purwosari.

(Utari, 2015) meneliti tentang suatu pusat layanan diperuntukkan untuk pemukiman di Kota Yogyakarta tahun 2014. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kecamatan di Yogyakarta yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menggunakan data jumlah penduduk dan luas wilayah, diolah menggunakan analisis *skalogram* dengan hasil penelitian terdapat dua kelas ordo tertinggi yaitu Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman.

(Aiyar, Shankkar; Bhupta, Malini; Ramesh Vinayak; Yadav, 2008) meneliti tentang kota-kota pertumbuhan: Kisah pertumbuhan India telah mendorong peningkatan pendapatan di daerah pedalaman yang menciptakan pulau-pulau konsumsi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertumbuhan yang mendorong menciptakan gelombang baru konsumerisme dan menciptakan nafsu untuk gaya hidup yang sebanding dengan yang ada di metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ergo dengan desain atau secara default, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi telah dikombinasikan untuk memberikan jawaban dari pertumbuhan ekonomi India. Kota-kota Tier III telah mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan konektivitas jalan dan pemasaran yang agresif.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Teori Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Konsep teori Hirschman yang dipaparkan oleh (Sjafrizal, 2008), mengatakan bahwa teori Hirschman lebih memfokuskan pada pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang, yaitu pertumbuhan ekonomi secara geografis akan dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan di suatu wilayah yang memberikan dorongan ke arah perkembangan berikutnya. Perkembangan suatu wilayah dimulai dengan titik original yang disebut *growing center* sampai dengan akhirnya tersebar ke bagian wilayah lainnya. Teori ini menunjukkan tingkat pembangunan wilayah cenderung tercapai ke titik pertumbuhan dengan kegiatan ekonomi yang lebih berpusat pada wilayah yang memiliki ketersediaan dan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana

dibandingkan wilayah yang tidak memiliki kelengkapan dan akan dampaknya terjadi peningkatan migrasi ke wilayah pusat pertumbuhan.

2.2.2 Teori Tempat Sentral

Ahli geografi Jerman yaitu Walter Christaller (Hartono, 2009) memaparkan teori tempat sentral yang merupakan wilayah pusat yang menjadi penghantar perdagangan dengan wilayah lain di sekitarnya. Suatu wilayah terdapat kecamatan sebagai fungsi wilayah sentral untuk daerah pendukungnya, daerah tersebut dinamakan tempat sentral tingkat tinggi, sedangkan daerah yang hanya merupakan pusat bagi aktivitas masyarakat setempat dinamakan tempat sentral rendah. Teori dasar mengenai tempat sentral menurut Christaller adalah sebagai berikut:

- a. *Population threshold* yaitu data jumlah penduduk suatu wilayah
- b. *Range* yaitu data jarak maksimum yang ditempuh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dari tempat pusat.

Dengan konsep tersebut, range dapat dikelompokkan menurut ordenya yaitu orde I adalah kelompok 4 yang merupakan barang superior seperti perhiasaan, orde II adalah kelompok 3 barang jenis kebutuhan sekunder seperti lemari, orde III adalah kelompok 2 merupakan barang jenis kebutuhan sekunder yang tidak dibeli setiap saat yaitu peralatan rumah tangga dan orde IV adalah barang jenis kebutuhan primer seperti beras (Nainggolan, 2013). Menurut Christaller setiap orde memiliki wilayah heksagonal yang menekan efisiensi dalam hal transportasi, pemasaran dan

administrasi (Hagget, 2001). Wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan harus memiliki fasilitas umum, seperti :

- a. Sarana perekonomian seperti pasar dan pertokoan
- b. Sarana transportasi dan komunikasi
- c. Tempat wisata dan gedung olahraga
- d. Sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan

Dengan ketersediaan fasilitas yang menyokong kebutuhan masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi, sosial dan budaya sehingga pekerjaan, tempat tinggal dan dan berwisata dapat dilakukan di dalam suatu wilayah (Jayadinata, 1986). Menurut model $k=3$, hierarki yang bernilai lebih rendah berada pada sudut hierarki yang lebih tinggi sehingga nilainya lebih rendah karena pengaruh dari tiga hierarki yang lebih tinggi. Teori ini menggambarkan $k=7$ karena adanya ketidak realistik, dimana beberapa wilayah nilainya lebih rendah dalam heksagonal dari wilayah pusat, heksagonal hanya memperlihatkan wilayah pemasaran dengan orde yang berbeda tetapi teori Christaller mengaitkan dengan susunan ordo perkotaan yang menjual barang ordo IV dan ordo III, ada yang menjual barang ordo II, III, dan IV dan ada yang menjual barang ordo I sampai dengan IV. Wilayah dengan orde tertinggi sampai dengan terendah menjual barang sehingga disebut ordo I, sedangkan ordo yang hanya menjual barang dengan ordo rendah maka ordo kotanya akan semakin rendah (Tarigan, 2005).

2.2.3 Teori Gravitasi

Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan fisika pertama yang memperkenalkan teori gravitasi yang menjelaskan bahwa dua buah benda dengan massa tertentu memiliki gaya tarik menarik antar keduanya. Kekuatan gaya tarik menarik berbanding lurus dengan hasil dua kali massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda (Utoyo, 2009). Teori gravitasi digunakan untuk mengetahui nilai interaksi antar wilayah kecamatan secara kuantitatif dengan perumpamaan suatu wilayah sebagai objek atau benda sedangkan jumlah penduduk sebagai massa. Nilai interaksi dapat tercermin dalam nilai perpindahan transportasi dan komunikasi antar wilayah dengan wujud berbentuk orang, barang, jasa ataupun informasi (Hartono, 2009). Perbandingan nilai interaksi antar wilayah dikemukakan oleh Reilly (Utoyo, 2009) syarat kondisi wilayah-wilayah yang dapat dibandingkan adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi sosial-ekonomi, seperti tingkat pendidikan, perekonomian, dan aktivitas penduduk setiap wilayah
- b. Kondisi alam, seperti topografi setiap wilayah
- c. Kondisi sarana dan prasarana, seperti transportasi penghubung antar wilayah.

2.2.4 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonom merupakan teori yang menjelaskan faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah berdasarkan tingkat ekspor atas

barang dan jasa dari luar daerah(Arsyad, 2004). Teori basis ekonomi (*economic base*) menyatakan bahwa seluruh wilayah adalah sistem sosio ekonomi, teori ini merupakan cabang dari teori *location quotient*, metode dalam menentukan besarnya ekspor perekonomian daerah dan derajat swasembada dalam suatu sektor. Teori basis ekonomi memiliki dua sektor yaitu sebagai berikut:

a. Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang- barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

b. Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan.

2.2.5 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin sendiri
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah

- e. Pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

Berdasarkan UU 32 tahun 2004 pasal 22 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan



- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi yaitu wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah berhubungan dengan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan desentralisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya dapat dimaksimalkan, dapat meningkatkan pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan dana yang didapat dari APBD.

2.2.6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo

Dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di Indonesia, pemerintah melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun yaitu tahun 2005-2025 dengan memuat visi, misi, dan arah kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD di

seluruh pemerintahan daerah termasuk Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2019 yang merupakan perluasan visi dan misi pembangunan daerah tahap lima tahun dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
- b. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing
- c. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis yang berlandaskan hukum
- d. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai, dan bersatu
- e. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- f. Mewujudkan Kulon Progo yang asri dan lestari
- g. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri
- h. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

Agar terlaksana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kulon Progo secara optimal, maka perlu dilakukannya pengembangan program-program pembangunan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang Ekonomi

Berorientasi pada pertumbuhan dan penguatan pembangunan ekonomi melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan dengan manajemen yang baik yang diharapkan masyarakat dapat secara mandiri guna menghadapi perdagangan bebas yang berdaya saing. Adapun kebijakan pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi yang meliputi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan wilayah strategis dengan mengembangkan produk unggulan serta meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha dan masyarakat.
3. Meningkatkan daya saing produk dalam rangka globalisasi serta era perdagangan bebas.

b. Bidang sarana dan prasarana

Berorientasi pada peningkatan fasilitas sarana dan prasarana umum guna membangun jaringan infrastruktur untuk daerah andalan dalam bidang ekonomi, pertanian, perindustrian serta obyek wisata dalam kondisi yang

mendukung dan dapat mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, dan memiliki layanan yang terintegrasi antar moda sehingga dapat terciptanya kenyamanan yang sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang digunakan sebagai berikut:

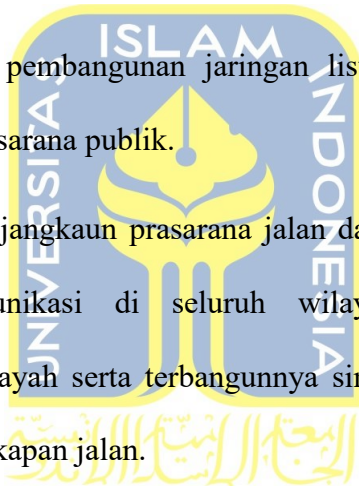
1. Meningkatkan koordinasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (*integrated water resources management*) dengan melaksanakan pemberdayaan petani pemakai air dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, teknis, dan finansial.
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat.
3. Pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air untuk mengantisipasi perkembangan daerah-daerah pemukiman dan pertanian.
4. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi yang diselenggarakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan perkumpulan petani pemakai air sesuai kewenangannya perlu didorong terus menerus dalam upaya mempertahankan kelestarian fungsi irigasi.

5. Meningkatkan upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemilihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

6. Meningkatkan pembangunan perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan sebagai rumah yang sehat serta semakin merata dan menjangkau bagi yang berpenghasilan rendah.

7. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik, air minum, sarana perekonomian dan sarana publik.

8. Meningkatkan jangkauan prasarana jalan dan sarana angkutan serta jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah untuk menunjang pengembangan wilayah serta terbangunnya simpul-simpul transportasi dan seluruh kelengkapan jalan.



c. Bidang Sosial Budaya

Berorientasi pada tata laku dan karakter masyarakat Kabupaten Kulon Progo melalui pendidikan masyarakat yang sudah dibentuk dan diterima secara umum yang bertujuan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan peraturan hukum, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan menjalankan nilai-nilai sosial dan budaya yang sudah dijalankan oleh masyarakat terdahulu. Kebijakan pembangunan bidang sosial budaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.
2. Meningkatkan pembinaan kesenian dan ketersediaan fasilitas dan kualitas sumber daya manusia pembina kesenian tradisional
3. Meningkatkan kualitas kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan pemerintah.

d. Bidang Kinerja Pemerintah

Berorientasi pada pembangunan tata pemerintahan yang bebas dari KKN dengan mengutamakan fasilitas aparatur pemerintah kepada masyarakat, partisipasi masyarakat serta kesadaran hukum seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Adapun kebijakan pembangunan bidang tata pemerintahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat terlayani secara prima, murah, mudah, cepat dan berkualitas.
2. Mengoptimalkan apresiasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Meningkatkan fasilitas pengembangan IPTEK, khususnya teknologi tepat guna.

4. Meningkatkan penegakan hukum, sehingga adanya kepastian hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Diduga wilayah pusat pertumbuhan mempunyai pengaruh yang positif terhadap wilayah pendukungnya (hinterland).
2. Diduga nilai interaksi antar kecamatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami perkembangan yang positif setiap tahunnya



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Operasional variabel yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jumlah fasilitas adalah jumlah keseluruhan fasilitas yang tersedia dalam satu wilayah. Fasilitas tersebut mencakup:
 - A. Sarana pemerintahan adalah data yang digunakan meliputi kantor camat, kantor desa, dan balai desa dalam satuan jumlah per tahun.
 - B. Sarana pendidikan adalah data yang digunakan meliputi TK, SD, SLTP, SMA/SMK dalam satuan jumlah per tahun.
 - C. Sarana kesehatan adalah data yang digunakan meliputi Rumah sakit, Puskesmas, dan puskesmas pembantu dalam satuan jumlah per tahun.
 - D. Tempat ibadah adalah data yang digunakan meliputi masjid, musholla, gereja kristen, gereja katolik, pura dan wihara dalam satuan jumlah per tahun.
 - E. Sarana perekonomian adalah data yang digunakan meliputi pasar, pom bensin, mini market dan lembaga keuangan dalam satuan jumlah per tahun.
 - F. Sarana pariwisata adalah data yang digunakan meliputi obyek wisata, restoran dan biro perjalanan dalam satuan jumlah per tahun.

2. Jumlah Penduduk

Adalah banyaknya orang yang menempati suatu wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah penduduk pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Kulonprogo dalam satuan jiwa per tahun.

3. Jarak Antar Kecamatan

Adalah jumlah jarak antara kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan kecamatan sebagai daerah hinterland, dalam satuan kilometer per tahun.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kab. Kulon Progo

Adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu beberapa pertahun. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2010-2017 dalam satuan jutaan rupiah per tahun.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Kulon Progo

Adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu satu periode. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Kulon Progo atas harga konstan menurut lapangan usaha periode tahun 2010-2017 dalam satuan jutaan rupiah per tahun.

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY

Adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu satu periode. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB Provinsi DIY atas harga konstan menurut lapangan usaha periode tahun 2010-2017 dalam satuan jutaan rupiah per tahun.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dibuat atau dikumpulkan oleh orang lain yang digunakan penulis dalam kurun waktu tertentu. Data sekunder ini tersedia dan bersumber dari BPS Kulonprogo (Badan Pusat Statistik), data yang digunakan terdiri dari :

1. Data fasilitas yang tersedia Kab. Kulon Progo tahun 2017
2. Data jumlah penduduk tiap kecamatan Kab. Kulon Progo tahun 2017.
3. Data jumlah jarak antar kecamatan Kab. Kulon Progo tahun 2017.
4. Data perkembangan PDRB per Kapita Kab. Kulon Progo tahun 2010-2017.
5. Data perkembangan PDRB Kab. Kulon Progo atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2010-2017
6. Data perkembangan PDRB D.I Yogyakarta menurut lapangan usaha tahunan 2010-2017

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis Skalogram

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model skalogram. Skalogram adalah alat analisis untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimiliki, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah (Rondinelli, 1985). Analisis ini digunakan untuk melihat jumlah dan jenis fasilitas yang berada pada tiap kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Dari jumlah ketersediaan fasilitas tersebut dapat ditentukan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo adalah kecamatan yang paling lengkap fasilitasnya. Sedangkan kecamatan yang ketersediaan fasilitasnya kurang lengkap akan menjadi wilayah *hinterland* atau wilayah pendukung.

Dengan metode ini, semua fasilitas yang dimiliki oleh setiap kecamatan di Kabupaten Kulon Progo akan didata dan disusun menurut pengelompokan enam fasilitas, yaitu sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, tempat ibadah dan sarana perekonomian. Selanjutnya metode Strugess digunakan untuk menentukan orde-orde pusat pertumbuhan pada kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Rumus yang digunakan untuk mencari kelas atau ordo pada setiap kecamatan sebagai pusat pertumbuhan sebagai berikut,

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

k = banyak kelas

n = banyak kecamatan

Selanjutnya menentukan besarnya interval kelas atau *range* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Range} = \frac{A-B}{k}$$

Keterangan:

A = jumlah fasilitas tertinggi

B = jumlah fasilitas terendah

k = banyak kelas



Langkah terakhir dalam melakukan analisis skalogram adalah dengan menghitung Coefficient of Reproducibility atau COR, yang memiliki fungsi untuk menguji kelayakan analisis skalogram. Penelitian dengan analisis skalogram dapat dikatakan layak jika nilai COR sebesar 0,9 sampai dengan 1. COR dihitung dengan rumus seperti dibawah,

$$(\text{COR}) = 1 - \frac{\sum e}{N \times k}$$

Keterangan:

COR = tingkat kesalahan

$\sum e$ = jumlah kesalahan

N = jumlah fasilitas

K = jumlah kecamatan

3.3.2 Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi, kaitan potensi suatu lokasi dengan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut (Utoyo, 2009).

Rumus analisis gravitasi adalah sebagai berikut,

$$A_{ij} = k \frac{p_i \cdot p_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan :

A_{ij} = besarnya interaksi wilayah i dengan wilayah j

P_i = jumlah penduduk di wilayah i, dalam ribuan jiwa

P_j = jumlah penduduk di wilayah j, dalam ribuan jiwa

d_{ij} = jarak dari wilayah i dengan wilayah j, dalam kilometer

k = angka konstanta empiris, bernilai 1

b = pangkat dari d_{ij} , yang sering digunakan b=2

3.3.3 Analisis Location Quotient

Analisis ini digunakan untuk melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan untuk daerah. Analisis Location Quotient (LQ) dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang dominan yang dapat dikategorikan sebagai sektor basis pada

kabupaten yang merupakan pusat pertumbuhan yang ada pada provinsi D.I Yogyakarta dengan membandingkan besarnya peranan suatu sektor di Kab. Kulon Progo terhadap besarnya peranan suatu sektor yang sama pada provinsi D.I Yogyakarta. Metode LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Besarnya LQ tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus : (Budiharsono dalam Nurhadi, 2012):

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

LQ : Nilai kuosien lokasi

v_i : PDRB sektor/sub sektor i pada wilayah Kab. Kulon Progo

v_t : PDRB total pada wilayah Kab. Kulon Progo

V_i : PDRB sektor/sub sektor i pada wilayah provinsi DI.Yogyakarta

V_t : PDRB total pada wilayah provinsi D.I Yogyakarta

Kriteria penggolongan sebagai berikut :

1. Jika $LQ > 1$, artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis yang mampu mengekspor hasil industrinya ke daerah lain.
2. Jika $LQ < 1$, artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor non basis yang mengimpor hasil industri daerah lain ke daerahnya.
3. Jika $LQ = 1$, artinya produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis di konsumsi daerah tersebut.

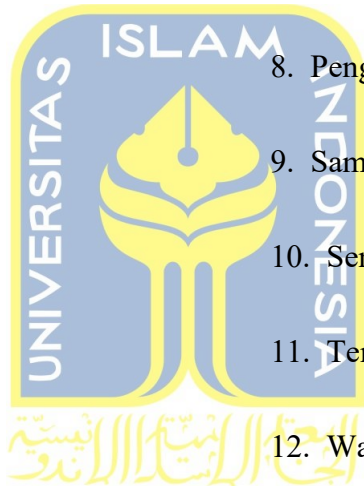
BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

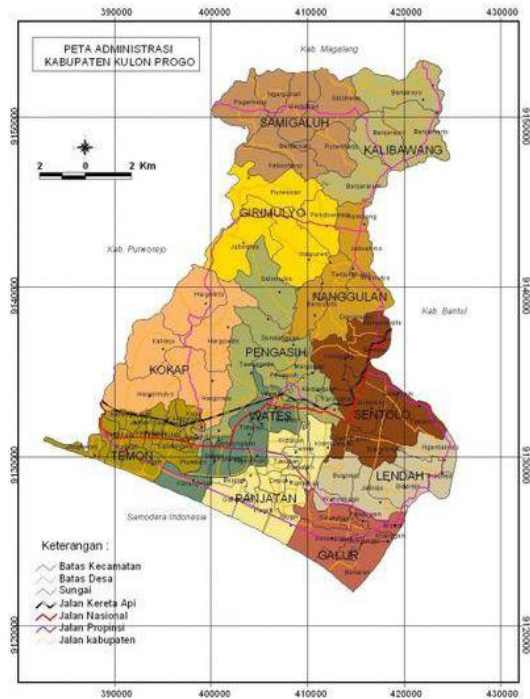
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah pendukung (*hinterland*) di daerah Kabupaten Kulon progo yang terdiri dari 12 kecamatan, yaitu :

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Galur | 7. Panjatan |
| 2. Girimulyo | 8. Pengasih |
| 3. Kalibawang | 9. Samigaluh |
| 4. Kokap | 10. Sentolo |
| 5. Lendah | 11. Temon |
| 6. Nanggulan | 12. Wates |



Dengan pembagian wilayah di Kabupaten Kulon Progo menurut kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

Peta Kabupaten Kulonprogo



Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Kulonprogo

Penelitian ini akan menggunakan beberapa data tentang fasilitas yang tersedia di setiap kecamatan Kabupaten Kulon Progo, fasilitas tersebut antara lain:

1. Sarana Pemerintahan
2. Sarana Perekonomian
3. Sarana Kesehatan
4. Sarana Pendidikan
5. Sarana Ibadah
6. Sarana Pariwisata

Tabel 4.1
Jumlah sarana pemerintahan Kecamatan Kab. Kulon progo tahun 2017

Kecamatan	Sarana Pemerintahan			Jumlah Unit
	Kantor Camat	Kantor Desa	Balai desa	
Panjatan	1	11	11	23
Pengasih	1	7	7	15
Temon	1	15	13	29

Tabel diatas merupakan salah satu data mengenai jenis-jenis fasilitas pada enam kelompok fasilitas, yaitu sarana pemerintahan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Data tersebut merincikan jumlah fasilitas pemerintahan yang dimiliki setiap kecamatan serta jumlah unit dari setiap kecamatan dan terdapat pula fasilitas yang belum dimiliki oleh kecamatan ataupun kekosongan jumlah fasilitas dikarenakan ketidakserdiaan data pada BPS Kabupaten Kulon Progo. Tabel yang berisikan data fasilitas digunakan sebagai bahan analisis skalogram.

4.2 Hasil dan Analisis

4.2.1 Analisis Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk menganalisis dan menentukan ordo atau kelasnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan jenis fasilitas dan jumlah fasilitas yang terdapat pada tiap-tiap kecamatan. Pada penelitian ini kecamatan yang digunakan adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Kulon Progo. Jumlah fasilitas yang digunakan sebagai penentu untuk

menetapkan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah *hinterland* atau daerah pendukungnya. Pada tabel lampiran yang berisikan data mengenai 6 sarana fasilitas dan terdapat 22 jenis fasilitas yang terdapat di 12 kecamatan Kabupaten Kulon Progo. Dari data tersebut dibuat tabel kesimpulan yang diperoleh dari jumlah total seluruh fasilitas yang ada pada tiap kecamatan Kabupaten Kulon Progo, berikutnya dibuat tabel hasil skalogram dengan perhitungan yang diberi angka “1” pada kolom jenis fasilitas yang memiliki fasilitas di kecamatan, dan angka “0” pada kolom jenis fasilitas yang tidak tersedia pada fasilitas di kecamatan tersebut.

Selanjutnya, adalah menghitung dengan menggunakan metode strugess untuk menentukan orde-orde daerah yang menjadi pusat pertumbuhan.

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah orde} &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 12 \\
 &= 1 + 3,3 (1,07918125) \\
 &= 1 + 3,56129811 \\
 &= 4,56129811
 \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini jumlah ordo sebesar 4,56129811 yang dibulatkan menjadi 5 ordo atau kelas untuk kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian adalah menentukan interval kelas atau *range* untuk 5 ordo yang telah dihitung sebelumnya. Dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Range} &= \frac{A-B}{k} \\
 &= \frac{20 - 16}{5} \\
 &= 0,8
 \end{aligned}$$

Didapatkan interval kelas atau *range* sebesar 0,8 dibulatkan menjadi 1 dengan jumlah kelas 5, maka dapat dibuatkan tabel ordo seperti berikut,

Tabel 4.2
Ordo dan Range Wilayah

Ordo	Range	Keterangan
Ordo I	21-22	Wilayah pertama yang menjadi kecamatan pusat pertumbuhan
Ordo II	19-20	Wilayah kedua yang menjadi kecamatan pusat pertumbuhan
Ordo III	17-18	Wilayah yang menjadi kecamatan pendukung
Ordo IV	15-16	Wilayah yang menjadi kecamatan pendukung
Ordo V	13-14	Wilayah yang menjadi kecamatan pendukung

Langkah terakhir dalam melakukan analisis skalogram adalah dengan menghitung tingkat kesalahan atau *Coefficient of Reproducibility (COR)*.

$$\begin{aligned}
 (\text{COR}) &= 1 - \frac{\sum e}{N \cdot k} \\
 &= 1 - \frac{16}{22 \cdot 12} \\
 &= 1 - 0,0606 \\
 &= 0,9394
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan tingkat t kesalahan sebesar 0,9394, nilai yang berada antara 0,9 - 1 atau lebih dari 90%, sehingga analisis skalogram pada fasilitas-fasilitas di tiap kecamatan Kabupaten Kulon Progo ini dianggap layak.

Berikut adalah tabel perolehan hasil akhir dari perhitungan analisis skalogram yang menunjukkan urutan kecamatan berdasarkan orde atau kelasnya. Terdapat urutan banyaknya unit fasilitas yang dimiliki dan jenis fasilitas. Kecamatan yang baik adalah kecamatan dengan orde atau kelas yang lebih kecil, yaitu dari orde I, orde II, orde III, orde IV dan Orde V. serta terdapat tingkat hierarki yang menunjukkan peringkat dengan urutan nomor paling kecil adalah yang paling baik dari nomor yang paling besar. Dalam tabel tersebut dapat dilihat perbandingan jenis fasilitas atau banyaknya unit fasilitas antar kecamatan sehingga lebih mudah menentukan orde. Nilai tersebut dapat ditampilkan dalam tabel dibawah ini,



Tabel 4.3
 Hierarki Pusat Pertumbuhan Kecamatan berdasarkan Analisis
 Skalogram di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Peringkat Hierarki	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Jumlah Unit Fasilitas	Orde Kota
1	Sentolo	48.920	20	365	Orde II
2	Temon	26.960	20	325	Orde II
3	Galur	31.405	20	257	Orde II
4	Wates	48.463	19	343**	Orde II
5	Pengasih	49.768	19	337**	Orde II
6	Samigaluh	26.416	18	321**	Orde III
7	Girimulyo	22.819	18	295**	Orde III
8	Kokap	32.396	17	333**	Orde III
9	Kalibawang	28.080	17	318**	Orde III
10	Lendah	39.753	17	287**	Orde III
11	Panjatan	36.512	17	250	Orde III
12	Nanggulan	29.731	16	267**	Orde IV

Sumber: Kecamatan dalam angka 2017
 BPS Kabupaten Kulonprogo

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah fasilitas dari masing-masing kecamatan pada lima kelompok fasilitas, serta jumlah total dari seluruh unit fasilitas tiap kecamatan. Dapat dilihat pada orde I adalah kecamatan yang memiliki fasilitas paling lengkap sehingga menjadi pusat pertumbuhan. Dari hasil penelitian menggunakan analisis skalogram di Kabupaten Kulon Progo dalam tabel 4.3 tidak terdapat kecamatan yang berada pada orde I karena ketidaklengkapan fasilitas yang ada di kecamatan tersebut sehingga pusat pertumbuhan terdapat pada orde II. Pada orde II terdapat lima kecamatan, artinya ada lima kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai kecamatan pusat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo.

Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Sentolo dengan 20 jumlah jenis fasilitas dan terdapat 365 jumlah unit fasilitas terbanyak, Kecamatan Temon dengan 20 jumlah jenis fasilitas dan 325 jumlah unit fasilitas, Kecamatan Galur dengan 20 jumlah jenis fasilitas dan terdapat 257 jumlah unit fasilitas, Kecamatan Wates dengan 19 jenis fasilitas dan 343 unit fasilitas dan Kecamatan Pengasih dengan 19 jenis fasilitas dan 337 unit fasilitas. Dari lima kecamatan yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo hanya terdapat tiga kecamatan yang memiliki data lengkap yang memenuhi persyaratan yaitu Kecamatan Sentolo dengan jumlah unit fasilitas tertinggi sebesar 365, Kecamatan Temon dengan jumlah unit fasilitas sebesar 325 dan Kecamatan Galur dengan jumlah unit fasilitas

257. Dari lima kecamatan yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan hanya terdapat dua kecamatan yang memiliki data lengkap memenuhi persyaratan yaitu Kecamatan Sentolo dengan jumlah unit fasilitas 365 dan Kecamatan Temon dengan jumlah unit fasilitas 325.

Pada orde III terdapat dua jumlah jenis fasilitas, yaitu kecamatan dengan jumlah jenis fasilitas sebanyak 18 dan jumlah jenis fasilitas sebanyak 17. Kecamatan yang memiliki jumlah jenis fasilitas sebanyak 18 adalah Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Girimulyo. Kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas sebanyak 17 adalah Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah dan Kecamatan Panjatan. Keempat kecamatan tersebut memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ketiga. Dalam orde III hanya Kecamatan panjatan yang memiliki data yang lengkap sedangkan tiga kecamatan yang lain tidak memiliki data yang lengkap.

Pada orde IV merupakan kecamatan yang tidak memiliki data yang lengkap. Pada orde ke IV hanya terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Nanggulan dengan jumlah fasilitas paling sedikit sebesar 16 dan jumlah unit fasilitas terdapat 267. Jika didapatkan data yang lebih lengkap dari BPS Kulon Progo dapat mengubah peringkat hierarki wilayah tersebut.

4.2.2 Analisis Gravitasi

Analisis Gravitasi merupakan analisis untuk mengetahui nilai interaksi antar kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan sebagai wilayah *hinterland*. Dapat di perhatikan tabel di bawah merupakan hasil dari perhitungan analisis gravitasi pada Kabupaen Kulon Progo,

Tabel 4.4
Tabel Kesimpulan Nilai Interaksi Wilayah Pusat Pertumbuhan & *Hinterland*

No	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Kecamatan Hinterland	Jumlah Penduduk Asal	Jumlah Daerah Tujuan	Jarak (i-j)	Jarak (i-j) ^b	Nilai Interaksi
1	Sentolo	Nanggulan	48.920	29.731	8	64	22.725.633
		Girimulyo		22.891	12	144	7.776.581
2	Temon	Kokap	26.960	32.396	10	100	8.733.962
3	Galur	Lendah	31.405	39.753	2	4	312.110.741
4	Wates	Panjatan	48.463	36.512	4	16	110.592.566
5	Pengasih	Kalibawang	49.768	28.080	34	1156	1.208.897
		Samigaluh		26.416	36	1296	1.014.407

Berdasarkan tabel kesimpulan terdapat lima kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, Kecamatan Galur, Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih. Dalam menentukan kecamatan yang menjadi wilayah *hinterland* dari suatu wilayah pusat pertumbuhan, dapat dilihat dari nilai interaksi kecamatan *hinterland* dengan kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan. Kecamatan *hinterland* akan menjadi wilayah pendukung bagi kecamatan pusat pertumbuhannya

apabila nilai interaksi menunjukkan angka lebih besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan yang lainnya.

Dalam penelitian pusat pertumbuhan dan wilayah *hinterland* di Kabupaten Kulon Progo ini ditemukan lima kecamatan yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan, yaitu Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, Kecamatan Galur, Kecamatan Wates dan Kecamatan Pengasih sehingga kecamatan tujuh lainnya yang bukan menjadi wilayah pusat pertumbuhan menjadi wilayah *hinterland* dengan angka interaksi yang berbeda-beda setiap kecamatan *hinterland* terhadap kecamatan pusat pertumbuhan.

Kecamatan Sentolo merupakan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan jumlah fasilitas paling banyak dengan kecamatan lain yang menjadi wilayah pertumbuhan, pada kecamatan ini memiliki dua wilayah *hinterland* yaitu Kecamatan Nanggulan dengan nilai interaksi sebesar 22.725.633 dan Kecamatan Girimulyo dengan nilai interaksi sebesar 7.776.581.

Pada Kecamatan Temon, Kecamatan Galur dan Kecamatan Wates hanya memiliki satu wilayah *hinterland*. Kecamatan Temon wilayah *hinterland*nya yaitu Kecamatan Kokap dengan nilai interaksi sebesar 8.733.962, Kecamatan Galur wilayah *hinterland*nya yaitu Kecamatan Lendah dengan nilai interaksi sebesar 312.110.741, Kecamatan Wates wilayah *hinterland*nya yaitu Kecamatan Panjatan dengan nilai interaksinya sebesar 110.592.566.

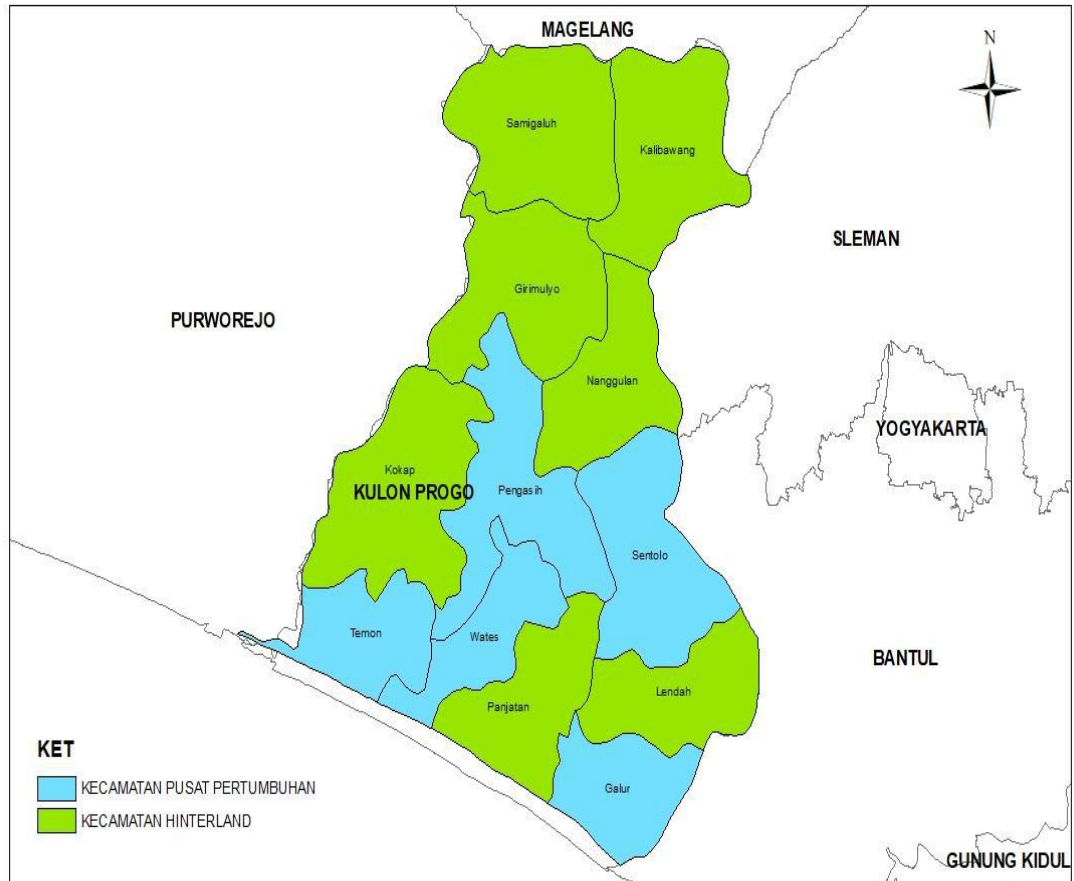
Kecamatan Pengasih memiliki dua wilayah hinterland yaitu Kecamatan Kalibawang dengan nilai interaksi sebesar 1.208.897 dan Kecamatan Samigaluh dengan nilai interaksi sebesar 1.014.407.

Pusat pertumbuhan Kecamatan Temon, Kecamatan Galur, Kecamatan Wates yang memiliki satu wilayah hinterland adalah Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah dan Kecamatan Panjatan. Pusat pertumbuhan Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih memiliki dua wilayah hinterland, dua kecamatan ini adalah wilayah yang memiliki paling banyak wilayah hinterland dibandingkan tiga kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan.

Hasil dari analisis skelogram dan analisis gravitasi dapat disederhanakan dalam gambar 4.2 dibawah,



PETA KABUPATEN KULON PROGO

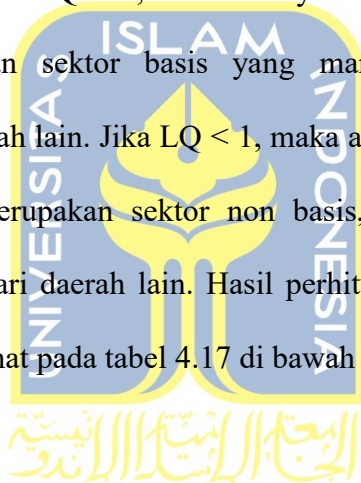


Gambar 4.2

Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo
Hasil Analisis Skalogram dan Gravitasi

4.2.3 Analisis Location Quotient

Analisis Location Quotient atau sering disingkat LQ digunakan untuk menentukan sektor-sektor yang dominan yang dapat dikategorikan sebagai sektor basis pada kabupaten yang merupakan pusat pertumbuhan yang ada di provinsi D.I Yogyakarta dengan membandingkan besarnya peranan suatu sektor di Kabupaten Kulon Progo terhadap besarnya peranan suatu sektor yang sama pada provinsi D.I Yogyakarta. Jika $LQ > 1$, maka artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor basis yang mampu mengekspor hasil industrinya ke daerah lain. Jika $LQ < 1$, maka artinya sektor yang ada di daerah tersebut merupakan sektor non basis, cenderung mengimpor hasil industrinya dari daerah lain. Hasil perhitungan Analisis Location Quotient dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini,



Tabel 4.5
Hasil analisis Location Quotient sektor perekonomian Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY Tahun 2010-2017

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,84	1,83	1,81	1,79	1,77	1,7	1,69	1,82	1,78
Pertambangan dan Penggalian	2,39	2,48	2,62	2,72	2,63	2,59	2,64	3,19	2,6
Industri Pengolahan	0,91	0,89	0,9	0,9	0,93	0,95	0,95	1,05	0,9
Pengadaan Listrik dan Gas	0,63	0,73	0,84	0,1	0,91	0,85	0,84	0,78	0,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,33	1,33	1,39	1,37	1,26	1,25	1,27	1,39	1,32
Konstruksi	0,87	0,88	0,9	0,9	0,9	0,9	0,92	1,03	0,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,5	1,55	1,59	1,63	1,6	1,64	1,62	1,76	1,61
Transportasi dan Pergudangan	1,69	1,67	1,46	1,57	1,49	1,49	1,46	1,53	1,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,4	0,39	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,39	0,37
informasi dan Komunikasi	0,59	0,62	0,64	0,69	0,74	0,78	0,8	0,86	0,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,79	0,75	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	0,28	0,69
Real Estate	0,27	0,51	0,51	0,52	0,51	0,51	0,51	0,5	0,48
Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,3	0,32	0,32	0,32	0,32	0,35	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,05	1,06	1,05	1,03	1,01	0,99	0,99	1,03	1,02
Jasa Pendidikan	0,71	0,72	0,76	0,77	0,77	0,57	0,78	0,86	0,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,58	0,57	0,59	0,61	0,62	0,67	0,62	0,67	0,61
Jasa Lainnya	1,56	1,59	1,55	1,58	1,58	1,62	1,62	1,69	1,59

Berdasarkan analisis Location Quotient terhadap 17 sektor perekonomian di Kab. Kulon Progo atas harga konstan tahun 2010-2017, dapat dilihat bahwa enam dari tujuh belas sektor di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor unggulan, hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ masing-masing sektor, dimana dari sektor tersebut memiliki nilai LQ di atas satu. Sektor perekonomian yang tergolong unggulan adalah Sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai rata-rata sebesar 2.6, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai rata-rata sebesar 1.78, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai rata-rata sebesar 1.61, Sektor Jasa Lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 1.59, Sektor Transportasi dengan nilai rata-rata sebesar 1,54, dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang dengan nilai rata-rata sebesar 1.32. Keenam sektor tersebut memiliki rata-rata nilai LQ > 1 artinya tingkat spesialisasi sektor-sektor perekonomian tersebut di tingkat Kab. Kulon Progo lebih besar dari sektor perekonomian yang sama di Provinsi D.I Yogyakarta. Maka dari itu, sektor perekonomian tersebut dapat memenuhi kebutuhan wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan mampu mengekspor produksinya ke daerah lain.

Sedangkan kesepuluh sektor lainnya merupakan sektor yang rata-rata nilainya di bawah satu. Sektor perekonomian tersebut adalah Sektor Konstruksi dengan nilai rata-rata sebesar 0.9, Sektor Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata sebesar 0.9, Sektor Jasa Pendidikan dengan nilai rata-rata sebesar 0.74, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai

rata-rata sebesar 0.71, Sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai rata-rata sebesar 0.71, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai rata-rata sebesar 0.69, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai rata-rata sebesar 0.61, Sektor Real Estate dengan nilai rata-rata sebesar 0.48, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai rata-rata sebesar 0.37, dan Sektor Jasa Perusahaan dengan nilai rata-rata sebesar 0.31 . Kesepuluh sektor tersebut memiliki rata-rata nilai $LQ < 1$ artinya bahwa tingkat spesialisasi sektor perekonomian tersebut di Kabupaten Kulon Progo lebih kecil dari sektor perekonomian yang sama di Provinsi D.I Yogyakarta. Maka dari itu kesepuluh sektor tersebut merupakan sektor non basis yang cenderung mengimpor hasil industri daerah lain ke daerahnya.

Serta sektor yang memiliki nilai rata-rata satu adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan rata-rata nilai $LQ = 1$, artinya bahwa sektor perekonomian tersebut di Kabupaten Kulon Progo nilainya sama dengan sektor perekonomian yang sama di Provinsi D.I Yogyakarta. Maka dari itu sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya dan belum mampu mengekspor produksinya ke daerah lain.

4.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Kulon Progo

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo memiliki visi-misi yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pembangunan

daerah adalah masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dengan mewujudkan kemandirian, maju, sejahtera lahir batin. Kemandirian tercermin dari sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, tingkat kemajuan diukur berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan serta tingkat pendapatan dan pemerataannya sedangkan sejahtera lahir batin tercermin dari kesempatan meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dari hasil analisis *skalogram* dan analisis gravitasi diperoleh bahwa dengan ditentukan lima pusat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo dapat mengefisienkan rencana pengembangan program pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2017. Menurut Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan tahun 2010, terdapat tiga sektor yang dominan yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Kulon Progo yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Dari hasil analisis *location quotient* dengan menggunakan PDRB Kab. Kulon Progo dan PDRB Prov. DIY Tahun 2010-2017, terdapat enam sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, sektor pengadaan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor jasa lainnya.

Hasil yang diperoleh bahwa sektor basis perekonomian Kabupaten Kulon Progo yang dapat dilihat dari RPJP Kabupaten Kulon Progo menurut data PDRB tahun 2010 sektor basisnya meliputi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor basis lebih mensejahterakan masyarakat, karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah salah satunya pada Sektor Pertanian yang menjadi sektor perekonomian unggulan, namun banyak lahan yang menjadi ahli fungsi akibat dari pembangunan bandara dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian basis perekonomian atau degradasi di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo.



BAB V

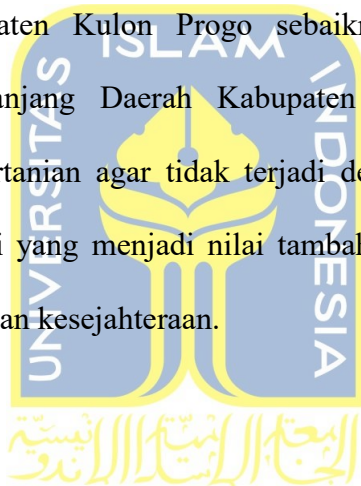
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis skalogram dan analisis gravitasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki lima kecamatan sebagai pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Sentolo, Kecamatan Wates, Kecamatan Galur, Kecamatan Temon dan Kecamatan pengasih. Dengan hasil penetapan lima kecamatan pusat pertumbuhan maka akan mengefisienkan pengembangan program pembangunan dan bidang-bidang yang menjadi target pembangunan daerah dapat tercapai.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo diperoleh sektor basis perekonomian di Kabupaten Kulon Progo menurut PDRB tahun 2010 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan dari hasil analisis location quotient yang menjadi sektor basis perekonomian Tahun 2010-2017 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, sektor pengadaan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa lainnya.

5.2 Implikasi

1. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hal yang dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu meningkatkan fasilitas publik melalui fasilitas sarana dan prasarana di setiap kecamatan-kecamatan Kabupaten kulon Progo agar terpenuhinya visi-misi pemerintah dan untuk menghindari terjadinya gap antara wilayah pusat pertumbuhan dan wilayah hinterlandnya.
2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya mereview kembali Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan menambah lahan pertanian agar tidak terjadi degradasi atau penurunan sektor basis ekonomi yang menjadi nilai tambah masyarakat agar dapat terciptanya peningkatan kesejahteraan.



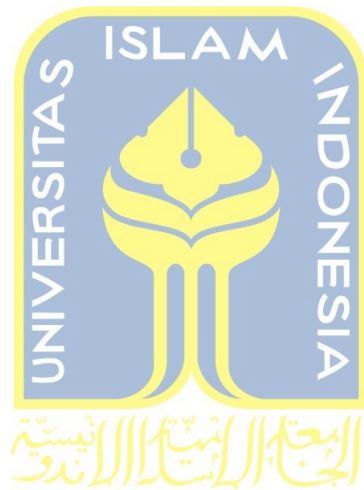
DAFTAR PUSTAKA

- Aiyar, Shankkar; Bhupta, Malini; Ramesh Vinayak; Yadav, S. R. (2008).
The growth towns : The Indian Growth Story has Fuelled a rise in
incomes in the Hinterland Creating New Islands of Consumption. *India
Today : New Delhi, 08(2)*, 45–60. Retrieved from
[https://search.proquest.com/docview/198724485/3B1CA9809B35406C
PQ/34?accountid=62100](https://search.proquest.com/docview/198724485/3B1CA9809B35406C/PQ/34?accountid=62100)
- Erawati, N. K., & Yasa, I. N. M. (2011). Analisis Pola Pertumbuhan
Ekonomi Dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *Fakultas
Ekonomi Universitas Udayana, Bali, Indonesia*.
- Hartono. (2009). *Geografi: Jelajah Bumi Alam dan Semesta*. Bandung:
Citra Raya.
- Imelda, Nurjayanti, & Ochadila, suhasty eka. (2013). *Identifikasi Pusat
Pertumbuhan dan Daerah Hinterland kota Palembang*.
- Jayadinata, J. T. (1986). *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan,
perkotaan, dan wilayah*.
- Kareza, imanda nico, & Muta'ali, L. (2010). variasi tingkat perekonomian
antar kecamatan di kabupaten kulon progo, *I(1)*, 31–42.
- Kuncoro, mudrajad. (2010). Metode kuantitatif : teori dan aplikasi untuk
bisnis dan ekonomi. In *System* (pp. 3–4).
- Maqin, A. (2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika, 10(01)*, 11–18.

- Nainggolan, P. T. (2013). Analisis penentuan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun pandapotan t.p nainggolan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Volume 1(02)*, 15–26.
- Partridge, M. D., Rickman, D. S., Ali, K., & Olfert, M. R. (2008). Lost in space: Population growth in the American hinterlands and small cities. *Journal of Economic Geography*. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbn038>
- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *AJIE -Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*.
- Rahayu, E., & Santoso, E. B. (2014). Penentuan Pusat-pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Teknik Pomits*.
- Ramlah, M. W. (2016). Pengaruh Kota Palu sebagai Pusat Pertumbuhan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Hinterland, *05(09)*, 72–79.
- Randinelli, D. A. (1985). Applied Methods of Regional Analysis, The Spatial Dimensions of Development Policy. *Colorado: Westview Press*, 57(2), 203. Retrieved from <https://doi.org/10.3828/tpr.57.2.e663164372702712>
- Sjafrizal. (2008). Ekonomi regional : teori dan aplikasi. In *Baduose Media* (Cet. 1). Padang.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Aksara Bumi.

- Utari, S. endang. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta tahun 2014. *Economic and Policy*, 08(01).
<https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.Journal>
- Utoyo, B. (2009). *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Wahyuningtiyas, dwi dhasta. (2011). Penetapan Kawasan Andalan sebagai Pusat Pertumbuhan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 09(01).
- Yani, A., & Ruhimat. (2007). *Geografi: Menyingkap Fenomena Geosfer*. Grafindo Media Pratama.
- Yarman, G. (2015). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias. *Jurnal Tata Ruang*, 18, 37–48.
- BPS. (2017). Badan Pusat Statistik. Retrieved December 17, 2016, from <https://kulonprogokab.bps.go.id>
- BPS. (2016). Badan Pusat Statistik. Retrieved March 18, 2018, from <https://kulonprogokab.bps.go.id>
- Kabupaten kulonprogo dalam angka 2017. Retrived April 13, 2019, from <https://kulonprogokab.bps.go.id>
- Renstra Bappeda KP2.(2017). Retrived April 13, 2019. 13.10 WIB
- RPJPD.(2007). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Retrived April 19, 2019

LAMPIRAN



Jumlah Sarana Pemerintahan di Kabupaten Kulon Pogo tahun 2017

Kecamatan	Sarana Pemerintahan			Jumlah Unit
	Kantor Camat	Kantor Desa	Balai desa	
Galur	1	7	7	15
Girimulyo	1	4	4	9
Kalibawang	1	4	3	8
Kokap	1	5	5	11
Lendah	1	6	6	13
Nanggulan	1	6	4	11
Panjatan	1	11	11	23
Pengasih	1	7	7	15
Samigaluh	1	7	6	14
Sentolo	1	8	8	17
Temon	1	15	13	29
Wates	1	7	7	15

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2017, diolah
BPS Kabupaten Kulon Progo

Jumlah Sarana Perekonomian di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Kecamatan	Sarana Perekonomian				Jumlah Unit
	Pasar	Mini market	SPBU	Keuangan lainnya	
Galur	3	2	1	1	7
Girimulyo	4	1	*	1	6
Kalibawang	7	2	*	1	10
Kokap	7	1	*	1	9
Lendah	4	4	0	1	9
Nanggulan	5	1	*	0	6
Panjatan	6	3	0	1	10
Pengasih	5	8	*	1	14
Samigaluh	6	12	*	1	19
Sentolo	8	2	2	1	13
Temon	6	11	3	3	23
Wates	5	3	2	1	11

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2017, diolah
BPS Kabupaten Kulon Progo

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Kecamatan	Sarana Kesehatan			Jumlah Unit
	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	
Galur	1	2	4	7
Girimulyo	*	2	3	5
Kalibawang	1	1	5	7
Kokap	*	2	7	9
Lendah	4	2	5	11
Nanggulan	3	2	4	9
Panjatan	0	2	6	8
Pengasih	*	2	5	7
Samigaluh	*	2	9	11
Sentolo	2	2	6	10
Temon	1	2	5	8
Wates	2	1	6	9

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2017, diolah
BPS Kabupaten Kulon Progo

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Kecamatan	Sarana Pendidikan								Jumlah Unit
	TK		SD		SLTP		SMA		
	N	S	N	S	N	S	N	S	
Galur	1	36	17	10	2	2	1	3	72
Girimulyo	2	17	18	2	4	1	2	0	46
Kalibawang	0	21	15	7	2	5	1	2	53
Kokap	0	23	31	6	3	2	2	0	67
Lendah	0	34	20	6	2	2	1	2	67
Nanggulan	2	18	22	2	2	3	1	3	53
Panjatan	1	24	23	3	2	2	1	-	56
Pengasih	2	29	32	3	4	1	3	2	76
Samigaluh	2	17	23	3	4	2	2	2	55
Sentolo	0	36	24	7	4	2	1	4	78
Temon	1	22	20	6	2	1	2	4	58
Wates	0	34	20	6	2	2	1	2	67

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2017, diolah
BPS Kabupaten Kulon Progo

Keterangan N : Negeri

S : Swasta

Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Kecamatan	Sarana Ibadah								Jumlah Unit
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu	Budha	
	Masjid	Musholla	Gereja	Rumah Kebangkitan	Gereja	Kapel	Pura	Vihara	
Galur	79	71	0	1	0	1	0	0	152
Girimulyo	96	72	0	2	0	3	0	6	179
Kalibawang	75	138	0	1	2	21	0	0	237
Kokap	118	113	1	2	0	1	0	0	235
Lendah	100	83	2	1	0	0	0	0	186
Nanggulan	82	95	1	0	1	7	0	0	186
Panjatan	92	56	1	0	0	0	0	0	149
Pengasih	124	91	0	2	0	2	0	0	219
Samigaluh	127	72	4	2	0	10	0	0	215
Sentolo	121	115	3	3	0	2	0	0	244
Temon	51	123	5	4	0	1	0	0	184
Wates	85	142	2	6	1	1	0	0	237

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2017, diolah BPS Kabupaten Kulon Progo

Jumlah sarana pariwisata di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Kecamatan	Pariwisata			Jumlah Unit
	Obyek Wisata	Restoran/ warung makan	Biro Perjalanan	
Galur	1	1	2	4
Girimulyo	17	33	0	50
Kalibawang	3	*	0	3
Kokap	*	0	2	2
Lendah	1	*	0	1
Nanggulan	0	*	2	2
Panjatan	2	0	2	4
Pengasih	1	1	4	6
Samigaluh	5	*	2	7
Sentolo	1	1	1	3
Temon	11	8	4	23
Wates	1	*	3	4

Sumber : Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2017, diolah
BPS Kabupaten Kulon Progo

Keterangan *: Terdapat ketidaklengkapan data

Tabel Kesimpulan Data Jumlah Fasilitas Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Unit Fasilitas						Jumlah Total
		Pemerintahan	Perekonomian	Kesehatan	Pendidikan	Tempat Ibadah	Pariwisata	
1	Galur	15	7	7	72	152	4	257
2	Girimulyo	9	6*	5*	46	179	50	295**
3	Kalibawang	8	10*	7	53	237	3*	318**
4	Kokap	11	9*	9*	67	235	2*	333**
5	Lendah	13	9	11	67	186	1*	287**
6	Nanggulan	11	6*	9	53	186	2*	267**
7	Panjatan	23	10	8	56	149	4	250
8	Pengasih	15	14*	7*	76	219	6	337**
9	Samigaluh	14	19*	11*	55	215	7*	321**
10	Sentolo	17	13	10	78	244	3	365
11	Temon	29	23	8	58	184	23	325
12	Wates	15	11	9	67	237	4*	343**

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2017, diolah
BPS Kabupaten Kulon Progo

Keterangan * : Terdapat ketidaklengkapan data

** : Jumlah total ketidaklengkapan data

Tabel Hasil Skalogram

Kecamatan	Jenis Fasilitas																					Jumlah	
	Pemerintahan			Perekonomian				Kesehatan			Pendidikan				Ibadah					Pariwisata			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
Galur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	20
Girimulyo	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	18
Kalibawang	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	17
Kokap	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	17
Lendah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	17
Nanggulan	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	16
Panjatan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	17
Pengasih	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	19
Samigaluh	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	18
Sentolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	20
Temon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	20
Wates	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	19

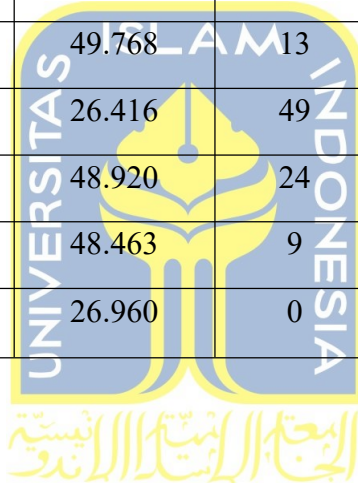
Sumber : Data diolah, 2017

Hasil Nilai Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dengan *Hinterland*

Kecamatan Asal	Kecamatan Tujuan	Penduduk Daerah Asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak (i-j)	Jarak (i-j) ^b	Angka Interaksi	Peringkat Interaksi
(i)	(j)	(P _i)	(P _j)	(d _{ij})/Km	(d _{ij}) ²	(A _{ij})	
Sentolo	Galur	48.920	31.405	16	256	6.001.299	7
	Girimulyo	48.920	22.891	12	144	7.776.581	4
	Kalibawang	48.920	28.080	23	529	2.596.736	9
	Kokap	48.920	32.396	23	529	2.995.864	8
	Lendah	48.920	39.753	15	225	8.643.186	3
	Nanggulan	48.920	29.731	8	64	22.725.633	1
	Panjatan	48.920	36.512	17	289	6.180.509	6
	Pengasih	48.920	49.768	11	121	20.121.079	2
	Samigaluh	48.920	26.416	25	625	2.067.633	11
	Temon	48.920	26.960	24	576	2.289.728	10
	Wates	48.920	48.463	18	324	7.317.315	5
	Sentolo	48.920	48.920	0	0	0	

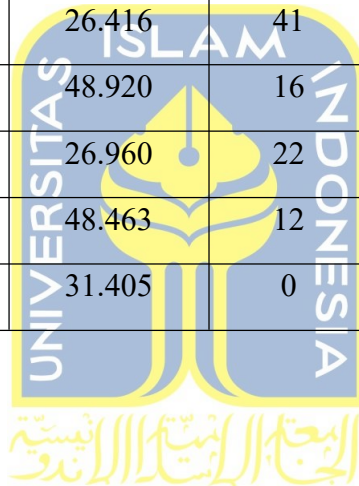
Hasil Nilai Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dengan *Hinterland*

Kecamatan Asal	Kecamatan Tujuan	Penduduk Daerah Asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak (i-j)	Jarak (i-j) ^b	Angka Interaksi	Peringkat Interaksi
(i)	(j)	(P _i)	(P _j)	(d _{ij})/Km	(d _{ij}) ²	(A _{ij})	
Temon	Galur	26.960	31.405	22	484	1.749.336	7
	Girimulyo	26.960	22.891	35	1225	503.789	9
	Kalibawang	26.960	28.080	46	2116	357.768	10
	Kokap	26.960	32.396	10	100	8.733.962	2
	Lendah	26.960	39.753	23	529	2.025.975	6
	Nanggulan	26.960	29.731	31	961	834.077	8
	Panjatan	26.960	36.512	14	196	5.022.263	4
	Pengasih	26.960	49.768	13	169	7.939.321	3
	Samigaluh	26.960	26.416	49	2401	296.616	11
	Sentolo	26.960	48.920	24	576	2.289.728	5
	Wates	26.960	48.463	9	81	16.130.401	1
	Temon	26.960	26.960	0	0	0	



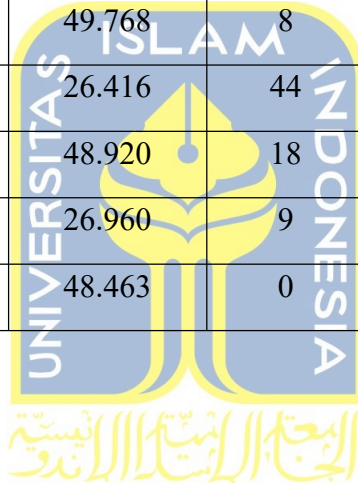
Hasil Nilai Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dengan *Hinterland*

Kecamatan Asal	Kecamatan Tujuan	Penduduk Daerah Asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak (i-j)	Jarak (i-j) ^b	Angka Interaksi	Peringkat Interaksi
(i)	(j)	(P _i)	(P _j)	(d _{ij})/Km	(d _{ij}) ²	(A _{ij})	
Galur	Girimulyo	31.405	22.891	28	784	916.954	9
	Kalibawang	31.405	28.080	39	1521	579.785	10
	Kokap	31.405	32.396	27	729	1.395.605	8
	Lendah	31.405	39.753	2	4	312.110.741	1
	Nanggulan	31.405	29.731	24	576	1.621.011	7
	Panjatan	31.405	36.512	8	64	17.916.553	2
	Pengasih	31.405	49.768	18	324	4.823.963	5
	Samigaluh	31.405	26.416	41	1681	493.512	11
	Sentolo	31.405	48.920	16	256	6.001.299	4
	Temon	31.405	26.960	22	484	1.749.336	6
	Wates	31.405	48.463	12	144	10.569.309	3
	Galur	31.405	31.405	0	0	0	



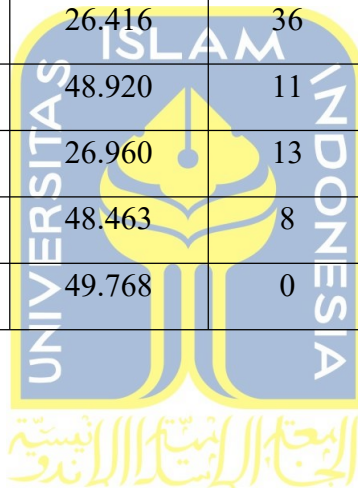
Hasil Nilai Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dengan *Hinterland*

Kecamatan Asal	Kecamatan Tujuan	Penduduk Daerah Asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak (i-j)	Jarak (i-j) ^b	Angka Interaksi	Peringkat Interaksi
(i)	(j)	(P _i)	(P _j)	(d _{ij})/Km	(d _{ij}) ²	(A _{ij})	
Wates	Galur	48.463	31.405	12	144	10.569.309	5
	Girimulyo	48.463	22.891	38	1444	768.259	10
	Kalibawang	48.463	28.080	41	1681	809.543	9
	Kokap	48.463	32.396	10	100	15.700.073	4
	Lendah	48.463	39.753	14	196	9.829.335	6
	Nanggulan	48.463	29.731	26	676	2.131.440	8
	Panjatan	48.463	36.512	4	16	110.592.566	1
	Pengasih	48.463	49.768	8	64	37.686.040	2
	Samigaluh	48.463	26.416	44	1936	661.260	11
	Sentolo	48.463	48.920	18	324	7.317.315	7
	Temon	48.463	26.960	9	81	16.130.401	3
	Wates	48.463	48.463	0	0	0	



Hasil Nilai Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dengan *Hinterland*

Kecamatan Asal	Kecamatan Tujuan	Penduduk Daerah Asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak (i-j)	Jarak (i-j) ^b	Angka Interaksi	Peringkat Interaksi
(i)	(j)	(P _i)	(P _j)	(d _{ij})/Km	(d _{ij}) ²	(A _{ij})	
Pengasih	Galur	49.768	31.405	18	324	4.823.963	7
	Girimulyo	49.768	22.891	22	484	2.353.800	9
	Kalibawang	49.768	28.080	34	1156	1.208.897	10
	Kokap	49.768	32.396	13	169	9.540.143	4
	Lendah	49.768	39.753	16	256	7.728.232	6
	Nanggulan	49.768	29.731	19	361	4.098.760	8
	Panjatan	49.768	36.512	10	100	18.171.292	3
	Samigaluh	49.768	26.416	36	1296	1.014.407	11
	Sentolo	49.768	48.920	11	121	20.121.079	2
	Temon	49.768	26.960	13	169	7.939.321	5
	Wates	49.768	48.463	8	64	37.686.040	1
	Pengasih	49.768	49.768	0	0	0	



PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2010-2017

No	Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.034.385,26	1.047.681,39	1.104.309,35	1.131.360,53	1.120.167,94	1.138.920,24	1.158.714,13	1.178.485,98
2	Pertambangan dan Penggalian	75.230,98	83.104,62	86.177,55	90.140,20	91.487,50	91.992,76	93.577,01	106.376,67
3	Industri Pengolahan	647.422,83	676.192,25	648.522,88	696.306,88	755.840,41	782.466,66	823.768,21	888.952,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.617,90	4.873,30	5.365,44	5.714,22	6.026,66	6.205,32	7.099,17	7.365,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.835,80	7.831,08	8.154,94	8.241,53	8.341,53	8.523,55	8.739,99	9.133,91
6	Konstruksi	416.742,67	439.159,43	464.304,22	483.855,75	508.855,75	530.760	565.132,81	633.469,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	629.403,95	660.920,55	718.882,82	757.217,69	796.717,69	848.655,92	901.270,62	977.513,94
8	Transportasi dan Pergudangan	476.989,48	482.028,83	486.869,91	502.391,57	512.691,34	531.194,16	545.330,79	564.545,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177.852,26	185.323,74	194.959,37	209.359,38	219.373,88	231.152,40	244.855,30	257.194,67
10	informasi dan Komunikasi	282.450,70	307.486,94	331.730,43	352.124,32	378.089,96	398.651,24	430.223,02	455.455,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	125.488,10	132.998,62	139.057,38	157.991,97	175.745,08	189.970,43	198.342,09	200.443,41
12	Real Estate	172.644,02	182.504,82	194.168,98	202.865,31	213.562,36	226.908,25	239.462,01	254.389,26
13	Jasa Perusahaan	16.128,63	16.957,37	17.618,14	18.328,69	19.560,46	20.889,15	21.612,53	22.706,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	390.597,33	407.381,53	438.666,19	461.077,71	488.812	513.344,61	544.978	571.987,94
15	Jasa Pendidikan	297.643,40	318.983,41	339.595,56	353.043,89	378.043,89	405.420,46	421.214	450.757,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.094,45	73.705,47	79.975,57	84.986,05	91.000	97.499,81	103.017,32	109.752,98
17	Jasa Lainnya	208.545,89	219.013,44	216.789,46	226.654,60	240.000	259.240,49	273.438,99	285.093,80
18	Total PDRB	5.033.073,65	5.246.146,78	5.475.148,20	5.741.660,29	6.004.316,44	6.281.795,76	6.580.776,13	6.973.625,52

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

PDRB DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha tahun 2010-2017

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto DI Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.252.595,00	7.805.134,50	8.640.411,70	9.449.019,70	9.769.112,40	10.793.840,10	11.456.173,00	11.932.787,90
Pertambangan dan Penggalian	406.711,00	455.989,70	467.147,50	495.039,50	537.599,50	573.133,00	593.156,20	615.943,00
Industri Pengolahan	9.215.500,00	10.280.006,90	10.242.467,70	11.563.733,80	12.614.921,00	13.303.467,80	14.547.348,30	15.635.872,10
Pengadaan Listrik dan Gas	94.730,00	91.000,60	90.992,00	863.394,50	101.943,80	118.012,20	141.794,30	173.689,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	76.110,90	79.885,10	83.130,30	89.645,30	102.669,90	109.697,20	114.764,90	121.272,20
Konstruksi	6.183.440,10	6.786.010,70	7.350.632,30	8.060.750,50	8.722.682,20	9.499.916,90	10.286.733,80	11.313.409,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.416.467,00	5.812.823,60	6.413.318,60	6.938.421,00	7.681.034,90	8.342.646,20	9.297.746,00	10.220.290,90
Transportasi dan Pergudangan	3.651.707,00	3.922.583,80	4.723.939,00	4.783.126,50	5.313.232,90	5.763.846,20	6.248.794,00	6.783.602,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.740.109,00	6.457.190,50	7.203.277,90	8.284.060,70	9.324.121,00	10.383.401,70	11.255.100,20	12.304.098,90
informasi dan Komunikasi	6.184.505,40	6.700.372,80	7.331.839,40	7.572.218,90	7.897.507,20	8.244.241,80	8.957.494,40	9.785.905,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.037.371,00	2.412.032,70	2.696.113,00	3.170.932,70	3.602.560,50	4.022.438,40	4.334.778,80	13.132.502,70
Real Estate	4.498.312,00	4.891.400,50	5.429.459,00	5.815.245,10	6.497.271,50	7.116.820,40	7.800.511,00	9.368.916,80
Jasa Perusahaan	722.493,00	783.185,60	836.060,20	855.439,40	956.390,60	1.048.359,30	1.115.852,40	1.209.401,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	4.777.665,90	5.223.332,50	5.931.303,60	6.702.818,70	7.492.245,80	8.379.231,50	9.217.107,90	10.213.350,40
Jasa Pendidikan	5.428.054,80	6.050.414,10	6.364.491,80	6.816.002,10	7.600.854,90	8.598.743,90	9.010.143,80	9.697.395,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.540.105,80	1.749.193,20	1.928.468,30	2.094.674,40	2.276.361,00	2.553.550,80	2.759.864,80	3.003.721,30
Jasa Lainnya	1.723.087,80	1.869.401,40	1.981.955,10	2.147.020,20	2.351.975,00	2.589.171,10	2.824.989,70	3.109.029,30
Total PDRB	64.948.966	71.371.969	77.715.007	85.701.543	92.842.484	101.440.519	109.962.354	128.621.188

Sumber : BPS DI Yogyakarta